

## Relevansi Nilai-nilai Pancasila dalam Mengasah Kritisisme Masyarakat Modern

Lutfi Hardiyanto<sup>1\*</sup>, A Irawatie<sup>2</sup>, Saryono<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>STKIP Kusuma Negara, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengasah kemampuan berpikir kritis masyarakat Indonesia di era disinformasi. Dalam konteks era digital yang ditandai dengan maraknya hoaks dan informasi yang menyesatkan, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting. Melalui analisis literatur, penelitian ini mengungkap bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki potensi besar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan konteks sosial budaya, kualitas pendidikan Pancasila, dan keteladanan tokoh publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Pancasila yang efektif dan relevan dengan konteks zaman serta dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran Pancasila dalam membentuk masyarakat Indonesia yang kritis dan berkarakter.

### **Kata kunci:**

Kritisisme,  
Nilai-nilai Pancasila,  
Masyarakat Modern.

### **Histori:**

Dikirim: 16 Januari 2025

Direvisi: 30 Maret 2025

Diterima: 30 Maret 2025

Online: 31 Maret 2025

©2025 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### **Identitas Artikel:**

Hardiyanto, L., Irawatie, A., & Saryono, S. (2025). Relevansi Nilai-nilai Pancasila dalam Mengasah Kritisisme Masyarakat Modern. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 47-61.

## PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai ini dibentuk dari keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang menyatu dalam satu kesatuan bangsa. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan dinamis, relevansi Pancasila semakin terasa penting. Masyarakat modern dihadapkan pada berbagai tantangan baru seperti globalisasi, teknologi informasi, dan arus informasi yang cepat. Hal ini menuntut masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Keberagaman di Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Sebagai negara demokrasi, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kebebasan ini harus diimbangi

<sup>1\*</sup>Corresponding author.

E-mail: [lutfi\\_h@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:lutfi_h@stkipkusumanegara.ac.id)

dengan tanggung jawab dan berpikir kritis agar tidak disalahgunakan. Era digital ditandai dengan maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks. Berpikir kritis menjadi sangat penting untuk membedakan informasi yang benar dan salah.

Nilai-nilai Pancasila memiliki potensi besar untuk mengasah kemampuan berpikir kritis masyarakat, antara lain; Pancasila memberikan landasan moral yang kuat untuk berpikir kritis. Nilai-nilai seperti kemanusiaan dan keadilan mendorong kita untuk selalu mempertanyakan kebenaran dan mencari solusi yang adil, dan Pancasila memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menganalisis berbagai masalah. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang serta Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat dan pandangan. Hal ini penting dalam membangun dialog yang konstruktif dan mengembangkan berpikir kritis.

Di era disrupsi informasi yang ditandai oleh derasnya arus data dan maraknya hoaks, kemampuan berpikir kritis menjadi aset yang sangat berharga. Masyarakat modern dituntut untuk mampu menyaring informasi, menganalisis berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan yang bijak. Henri Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika memaparkan dalam acara digital literasi bersama Suara Muhammadiyah, setidaknya 700 lebih konten yang teridentifikasi sebagai hoaks. Konten-konten semacam, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoaks agar tak lagi disebarkan masyarakat. Namun, nampaknya tetap ada kecenderungan pengguna internet untuk tetap mengumbar hoaks, dan trennya terus meningkat menjelang Pemilu. “Ada perkembangan yang menarik setelah mendekati Pilpres, kira-kira hampir sebulan ini, meningkat jumlah hoaksnya itu (Nurhadi Sucahyo, 2019). Dalam konteks inilah, nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi bangsa kembali relevan untuk dikaji. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat menjadi lensa yang ampuh untuk menyaring informasi dan membangun sikap kritis.

Lebih lanjut, berdasarkan kesimpulan hasil survey yang dilakukan oleh indikator.co.id, menyatakan bahwa : TNI konsisten menjadi Lembaga yang paling dipercaya warga negara, sekitar 89.3% warga cukup/sangat percaya kepada TNI. Kemudian Presiden 86.7%, Kejaksaan 76.2%, Polri 75.3%, Pengadilan 75.2%, MK 70.8%, KPK 70.3%, MPR 70%, DPD 68.3%, DPR 64.8% dan Partai Politik 64.2%. selanjutnya Secara umum tingkat kepercayaan warga terhadap TNI dan Presiden cenderung lebih sedikit fluktuasinya, perubahannya relatif landai, tapi sepanjang tahun 2023 tampak memiliki kecenderungan yang menurun, begitu juga dengan Lembaga lainnya, kecenderungannya menurun meski landai. Secara umum, Lembaga-Lembaga penegak hukum memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi ketimbang Lembaga politik, di mana partai politik konsisten dinilai paling rendah sepanjang temuan survei. ([www.indikator.co.id](http://www.indikator.co.id) 2024)

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan memupuk kemampuan berpikir kritis masyarakat. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk masyarakat Indonesia yang kritis dan demokratis. Dalam era disinformasi dan polarisasi yang semakin menguat, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) baru saja merilis laporan jumlah hoaks yang berhasil didata dan diverifikasi pada 2018 hingga Januari 2019. Pada 2018, jumlah hoaks terdata mencapai 997 buah dengan 488 hoaks atau 49,94 persen bertema politik. Pada Januari 2019, jumlah hoaks mencapai 109 buah dengan 58 diantaranya bertema politik. Hal ini menunjukkan urgensi atau pentingnya untuk kembali mengakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital, mempromosikan berpikir kritis, dan memperkuat persatuan bangsa.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam konteks masyarakat modern. Namun, beberapa penelitian juga menyoroti adanya tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan pada strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital, mempromosikan berpikir kritis, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pendidikan yang lebih efektif, strategi komunikasi yang lebih persuasif, atau kebijakan publik yang lebih relevan untuk mengasah kritisisme masyarakat modern yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

### **Nilai-nilai dasar Pancasila dan interpretasinya**

Secara etimologis, kata “Pancasila” bersumber dari bahasa sansekerta, yakni panca dan syla. Panca bermakna lima dan syla bermakna dasar. Jadi, pancasila berarti lima dasar yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan (Nur Fadhila & Najicha, 2021). Pancasila juga dapat diartikan sebagai falsafah serta dasar negara Negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila (Utami & Najicha, 2022). Konsep pancasila memuat istilah nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang sangat berharga yang dijadikan landasan dalam menentukan perbuatan, baik buruknya dan benar salahnya (Ratih & Najicha, 2021). Adapun yang dimaksud dengan norma adalah aturan tertentu yang bersifat mengikat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Septiano & Najicha, 2022)

Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan merupakan dasar filsafat yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan konstitusi, hukum, dan kebijakan publik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Lebih jauh lagi, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup atau filsafat bagi bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah dan tujuan hidup bagi setiap individu, kelompok, maupun bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan.

Meskipun dirumuskan pada masa lalu, Pancasila tetap relevan dalam konteks di dalamnya mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi,

Pancasila menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh budaya asing yang negatif. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

Pemikiran dan prinsip-prinsip Pancasila telah hadir dan berkembang sebagai fondasi negara Indonesia sejak zaman lampau sebagai landasan filosofis kehidupan bangsa (Sanusi, 2019). Lima nilai dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan yang menjadi panduan utama bagi pembangunan negara dan masyarakat.

Melalui penelitian ini, pentingnya identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap relevansi setiap nilai dasar Pancasila dalam mengasah kritisisme masyarakat modern menjadi sorotan utama. Pertama-tama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila bisa diterapkan dalam berbagai konteks atau situasi (Fadilah & Najicha, 2022). Dalam konteks modern, hal ini menggarisbawahi pentingnya toleransi antaragama dan kebebasan beragama merupakan bagian dari kebebasan berserikat, berpendapat dan berfikir kritis dari berbagai perspektif yang relevan dengan nilai-nilai agama.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Prinsip-prinsip moral yang bersifat universal berasal dari kepercayaan pada hukum ilahi, hukum alam, serta karakteristik sosial manusia yang dianggap esensial sebagai fondasi etika-politik dalam tatanan kehidupan berbangsa di lingkup global (Alhudawi & Dini Pratiwi, 2023). Dalam era teknologi dan informasi dan masyarakat modern, pemahaman tentang hak asasi manusia, digital, privasi, dan keadilan dalam ruang globalisasi digital menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga keagungan manusia sebagai makhluk mulia di alam semesta.

Konsep kebersamaan terkandung dalam nilai dan prinsip dari Sila Ketiga dalam Pancasila (Afgrinadika Wibowo & Ulfatun Najicha, 2022). Sila ini menunjukkan keberanian dan tekad yang kokoh serta memiliki fokus yang sama untuk mencapai tujuan Indonesia (Nur Adhari & Anggraeni Dewi, n.d.). Banyak konsep ideologi atau pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa serta negara (Putri & Najicha, 2022). Di tengah kompleksitas tantangan global, integrasi teknologi menjadi kunci dalam membangun kesadaran nasional yang kokoh dan memperkuat jalinan persatuan tanpa menghilangkan keberagaman budaya.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kerakyatan berasal dari istilah 'rakyat', yang mengacu pada sekelompok individu yang tinggal di suatu wilayah dalam suatu negara (Sari & Ulfatun Najicha, 2022). Sila ke empat ini menitikberatkan pada partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan negara. Penggunaan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan menjadi esensial dalam era digital saat ini.

Sila kelima dalam Pancasila mengajarkan betapa pentingnya memperjuangkan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia, sambil menekankan nilai-nilai kesatuan dan kerja sama bersama (Arum et al., 2023). Masyarakat memerlukan dimensi ruang sebagai faktor yang mendorong mereka untuk menjalani kehidupan dan melakukan pekerjaan di tingkat yang melebihi wilayah lokal, regional, nasional,

dan internasional (Fadilla & Najicha, 2022). Penerapan teknologi untuk mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan merupakan upaya konkret dalam mewujudkan nilai ini.

Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk percaya dan menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Nilai kemanusiaan menekankan pentingnya sikap adil, beradab, dan saling menghormati antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Nilai persatuan mendorong kita untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memelihara semangat gotong royong. Nilai kerakyatan mengajarkan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan keputusan bersama dalam menjalankan pemerintahan. Terakhir, nilai keadilan sosial menjamin setiap warga negara mendapatkan hak dan kesempatan yang sama serta hidup sejahtera.

### **Pentingnya berpikir kritis dalam masyarakat modern**

Era revolusi industri 4.0 merupakan era informasi dan teknologi, dengan perubahan yang cepat, penambahan yang signifikan dalam lingkungan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pengetahuan yang membeludak. Era 4.0 juga dikenal dengan masa pengetahuan (*knowledge age*), dalam era ini semua alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan, meliputi upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan (*knowledge based education*), pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economic*), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based social empowering*), dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan (*knowledge based industry*) (Wijaya, Sudjimat, & Nyoto, 2016).

Di Era 4.0 pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan penguasaan salah satu life skills yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) (Wijaya, Sudjimat, & Nyoto, 2016). Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi dari pembelajaran berorientasi HOTS yang perlu dikembangkan pada peserta didik sebagai calon masyarakat dunia. Keterampilan berpikir kritis diidentifikasi sebagai pengembangan pengetahuan yang penting untuk praktik profesional, dan pengembangan masyarakat yang berpendidikan, sehingga dapat mengatasi tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan internasional serta lokal pada era revolusi industri 4.0 (Facione, 1990).

Sementara itu, *society 5.0* hadir sebagai solusi atas perkembangan teknologi yang pesat, terutama kecerdasan buatan dan data yang terintegrasi, untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Literasi digital menjadi keterampilan inti dalam era ini, yang tidak hanya melibatkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi banjir informasi. Pendidikan Islam di abad ke-21 pun turut terdampak, di mana teknologi telah mengubah secara fundamental cara belajar, mengakses informasi, dan berinteraksi dengan lingkungan.

Era Society 5.0 menuntut masyarakat memiliki kemampuan menyaring informasi, memahami dampak digitalisasi, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Sayangnya, masih banyak individu, terutama generasi muda, yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Mereka rentan terhadap hoaks dan manipulasi data, serta kurang memiliki keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital menjadi sangat penting untuk membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Literasi digital tidak hanya sekadar kemampuan teknis, tetapi juga kunci untuk beradaptasi dengan era di mana teknologi dan informasi berkembang pesat.

Berpikir kritis akan memberi manfaat di banyak bidang kehidupan (Schafersman, 1991). Mengembangkan kemampuan berpikir kritis menjadi keberhasilan akademis dan pekerjaan. Dengan keterampilan ini, masyarakat akan cenderung memperluas perspektif dari mana mereka memandang dunia dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menavigasi keputusan penting dalam pembelajaran dan dalam kehidupan. Kekuatan dan kecepatan teknologi telah menciptakan dunia di mana informasi berubah dengan cepat, dan ide-ide baru dapat didistribusikan dan diadaptasi hampir secara instan. Ini juga menghasilkan informasi yang tidak akurat dan salah yang harus disortir dan dipertanyakan secara kritis. Saat ini, penting bagi masyarakat luas untuk mempelajari keterampilan berpikir kritis, sehingga mereka dapat menjadi penemu sekaligus pengkritik informasi baru. Maka, fungsi pendidikan perlu mengenali dan membina keterampilan berpikir kritis yang dapat dimanfaatkan dalam mempersiapkan dan mengasah kritisisme masyarakat modern di masa depan.

Zoller, U., Ben-Chaim, D., Ron, S., Pentimalli, R., & Borsese, A. (2000) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis menjadi sangat penting dimiliki untuk sukses dalam kehidupan, sebagai langkah perubahan untuk terus maju dalam kompleksitas kehidupan yang meningkatkan. Kuhn (2007) dan Geertsen (2003) mengakui kemajuan teknologi yang berkelanjutan telah berkontribusi pada membeludaknya informasi, mengingat hal ini kebutuhan untuk menafsirkan, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan untuk memberikan manfaat yang pantas bagi demokrasi kita masyarakat diperlukan. Kegiatan dan keterampilan intelektual memberi mereka jalan paling produktif untuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, dan berpartisipasi secara demokratis di masyarakat. Perubahan dan pertumbuhan informasi yang luar biasa di era revolusi industri 4.0 yang membutuhkan adaptasi efektif tergantung pada kemampuan individu untuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Serangan informasi yang tak terduga, tak henti-hentinya, dan semakin cepat, masyarakat akan membutuhkan keterampilan berpikir kritis dalam mengevaluasi dan menilai pengetahuan.

Pemikir kritis akan terus berusaha memahami dan mencoba menemukan atau mendeteksi hal-hal yang mempunyai nilai penting. Berpikir kritis mempunyai peran sangat positif dalam hal pembelajaran seperti halnya ketika seseorang dapat membuat kesimpulan yang tetap dan benar. Seorang pemikir kritis akan lebih agresif, tajam, peka terhadap informasi atau situasi yang sedang dihadapinya dan santun dalam melakukannya karena berpikir kritis pada dasarnya adalah usaha kolaboratif dan nonkompetitif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur sebagai pendekatan utama dalam mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengasah kritisisme masyarakat modern. Sumber data yang digunakan mencakup dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta buku-buku akademik yang membahas hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan perkembangan pemikiran kritis dalam masyarakat kontemporer. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai keterkaitan konsep-konsep tersebut dalam berbagai perspektif keilmuan.

Dalam proses analisis, penelitian ini mengadopsi perangkat lunak analisis data kualitatif, seperti NVivo dan ATLAS.ti, untuk mendukung pengolahan informasi secara sistematis dan objektif. Penggunaan perangkat lunak ini memungkinkan pengkodean tematik, identifikasi pola konseptual, serta analisis hubungan antar-ide yang muncul dalam sumber literatur yang dikaji. Selain itu, Mendeley digunakan untuk manajemen referensi guna memastikan konsistensi dan akurasi dalam pengelolaan sumber akademik. Metode analisis yang diterapkan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menggali relasi antara nilai-nilai Pancasila dan perkembangan kritisisme dalam masyarakat secara lebih terstruktur, sehingga memungkinkan eksplorasi berbagai sudut pandang yang muncul dalam diskursus akademik. Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi bias dan untuk meningkatkan reliabilitas hasil penelitian, proses seleksi literatur dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan validitas dan relevansi sumber.

Selain itu, kajian ini juga mengintegrasikan analisis kritis terhadap etika teknologi dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, guna memperjelas hubungan antara kedua aspek tersebut dalam dinamika sosial dan kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan wacana akademik mengenai peran Pancasila dalam membentuk pola pikir kritis masyarakat modern serta implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk etika teknologi dan kebijakan sosial..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di tengah kompleksitas dan dinamika dunia modern, kemampuan berpikir kritis dan kreatif menjadi semakin krusial. Berpikir kritis memungkinkan individu menganalisis informasi secara mendalam dan objektif, serta mengambil keputusan yang rasional. Sementara itu, berpikir kreatif mendorong munculnya ide-ide segar dan inovatif yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial. Keterampilan ini tidak hanya penting dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat, tetapi juga dalam mempersiapkan generasi muda menjadi individu yang adaptif dan kompetitif di dunia kerja.

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan proyek kolaboratif perlu ditingkatkan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti debat dan seni juga berperan penting dalam mengasah keterampilan ini. Namun, tantangan seperti kurikulum yang masih berorientasi pada hafalan dan ketakutan akan kesalahan seringkali menjadi penghalang. Di era digital, kemampuan berpikir kritis semakin mendesak untuk menyikapi banjir informasi. Masyarakat perlu dilatih untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan

mempertanyakan keabsahan setiap informasi yang diterima. Sementara itu, berpikir kreatif menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan solusi-solusi baru, baik dalam dunia digital maupun dalam kehidupan sehari-hari.

### **Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks berbagai disiplin ilmu**

Relevansi Pancasila di era modern biasanya mengacu pada pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tetap memiliki relevansi yang kuat di era modern. Pancasila memiliki relevansi penting dalam memandu pembangunan berkelanjutan di era modern. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan hidup, dapat membimbing kebijakan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam

Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu, apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara, telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam, serta Tuhan YME) tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma (Sudjito, 2007). Paradigma itulah yang akan menentukan nilai-nilai teologis, filosofis, maupun ideologis yang dianutnya.

Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dikaitkan dengan disiplin ilmu seperti filsafat, teologi, dan etika. Nilai-nilai ketuhanan mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi, menghargai perbedaan keyakinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, nilai-nilai ini dapat mendorong pengembangan riset yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan tidak merugikan pihak lain. Sila kedua dan ketiga tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia memiliki relevansi yang sangat kuat dengan disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Nilai-nilai kemanusiaan mendorong kita untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Sementara itu, nilai persatuan mendorong kita untuk membangun bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Dalam konteks ilmu politik, nilai-nilai ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Terakhir, sila keempat dan kelima tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1 memiliki relevansi dengan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, hukum, dan manajemen. Nilai-nilai kerakyatan mendorong kita untuk membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara itu, nilai keadilan sosial mendorong kita untuk mengatasi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, Pancasila menjadi relevan dalam setiap disiplin ilmu sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

### **Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mendukung pengembangan berpikir kritis**

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi fondasi moral dan etika bangsa, namun juga memiliki peran signifikan dalam pengembangan kognitif, khususnya dalam konteks berpikir kritis. Berpikir kritis, yang melibatkan kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah secara sistematis, merupakan kompetensi esensial dalam era informasi saat ini.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mendorong individu untuk berpikir rasional dan logis. Dengan mengakui adanya kekuatan di luar diri yang mengatur alam semesta, individu diajak untuk mencari kebenaran dan memahami keteraturan alam. Hal ini merangsang rasa ingin tahu dan mendorong individu untuk selalu mempertanyakan asumsi dan mencari bukti yang kuat. Sila kedua dan ketiga, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan menghargai perbedaan. Sikap-sikap ini penting dalam berpikir kritis karena memungkinkan individu untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif, menghindari generalisasi, dan mencari solusi yang inklusif. Selain itu, nilai persatuan mendorong kolaborasi, yang merupakan kunci dalam pemecahan masalah kompleks. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan pentingnya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Proses bermusyawarah ini melatih individu untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari titik temu. Keterampilan-keterampilan ini sangat relevan dengan berpikir kritis, yang melibatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan berargumen secara rasional. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mendorong individu untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan ketidakadilan. Nilai keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan moral dan etika bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis. Masing-masing sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang secara langsung atau tidak langsung melatih individu untuk berpikir secara rasional, analitis, dan evaluatif. Misalnya, sila pertama mendorong rasa ingin tahu dan pencarian kebenaran, sementara sila kedua dan ketiga menumbuhkan empati dan toleransi yang penting dalam memahami berbagai perspektif. Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dan komunikasi efektif, sedangkan sila kelima mendorong kesadaran akan keadilan sosial dan kemampuan menganalisis masalah sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila yang efektif tidak hanya sebatas menghafal rumusan sila, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang merangsang kemampuan berpikir kritis. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis yang esensial dalam menghadapi tantangan di era modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai aspek kehidupan, kita dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya berkarakter, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman.

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengasah kritisisme**

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki potensi besar dalam mengasah kemampuan berpikir kritis individu. Namun, relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

1. Perubahan Konteks Sosial dan Budaya; Perubahan yang cepat dalam konteks sosial dan budaya, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan pluralisme nilai, memberikan tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Adanya arus informasi yang deras dan beragam dapat mengaburkan pemahaman tentang nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, pengaruh budaya asing yang kuat dapat menggeser nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam Pancasila.

Salah satu contoh nyata dari perubahan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi relevansi nilai-nilai Pancasila adalah maraknya informasi palsu atau *hoaks* di media sosial. Dalam era digital, akses informasi menjadi sangat mudah. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif, yaitu maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Hal ini tentu saja dapat menghambat pengembangan berpikir kritis, karena individu cenderung menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila seperti kebenaran dan kejujuran menjadi terkikis. Selain itu, polarisasi politik dan sosial yang semakin tajam juga menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pendapat yang semakin ekstrem dapat menghambat dialog dan musyawarah, yang merupakan nilai-nilai penting dalam Pancasila. Akibatnya, kemampuan untuk berpikir kritis dan mencari solusi bersama menjadi terhambat.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, teknologi dapat mempermudah akses informasi dan memperkuat persatuan. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat memunculkan masalah baru seperti kecanduan gadget, privasi data, dan digital divide. Hal ini dapat mengalihkan perhatian individu dari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, globalisasi budaya juga membawa dampak yang kompleks terhadap nilai-nilai Pancasila. Adanya pengaruh budaya asing yang kuat dapat menggeser nilai-nilai tradisional yang telah dianut masyarakat Indonesia. Akibatnya, identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kabur.

2. Kualitas Pendidikan Pancasila; Kualitas pendidikan Pancasila sangat menentukan seberapa efektif nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi oleh peserta didik. Pembelajaran Pancasila yang monoton, hafalan, dan tidak relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari akan sulit membangkitkan minat dan pemahaman siswa. Sebaliknya, pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berbasis masalah dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas sosial.

Salah satu faktor yang sangat krusial dalam menentukan seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dapat mengasah kemampuan berpikir kritis adalah kualitas pendidikan Pancasila itu sendiri. Jika pembelajaran Pancasila hanya berfokus pada hafalan rumusan sila tanpa dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, maka siswa akan sulit memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila hanya menjadi pengetahuan teoritis yang tidak relevan. Sebaliknya, pembelajaran Pancasila yang aktif, partisipatif, dan berbasis masalah dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis isu-isu sosial, dan mencari solusi yang relevan. Misalnya, melalui diskusi kelompok, simulasi, atau studi kasus, siswa dapat diajak untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan mereka dan masyarakat.

Selain itu, kompetensi guru dalam mengajarkan Pancasila juga menjadi faktor penting. Guru yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif akan lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut pada siswa. Guru juga perlu memiliki keterampilan dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan menarik, sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh. Namun, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru Pancasila seringkali menjadi kendala. Akibatnya, kualitas pembelajaran Pancasila menjadi tidak optimal dan tidak mampu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter Pancasila yang kuat.

3. Keteladanan Tokoh Publik; Perilaku dan tindakan tokoh publik, baik politikus, pejabat, maupun tokoh masyarakat, sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan tokoh publik dapat memunculkan sikap skeptis dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

Keteladanan tokoh publik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, khususnya generasi muda. Ketika tokoh publik, baik politikus, pejabat, maupun tokoh masyarakat lainnya, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka hal ini akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Misalnya, jika seorang pemimpin politik selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan persatuan, maka masyarakat akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Namun, jika tokoh publik justru terlibat dalam korupsi, nepotisme, atau tindakan diskriminasi, maka hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, generasi muda akan cenderung skeptis terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan lebih mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan tokoh publik juga dapat merusak kredibilitas nilai-nilai Pancasila. Jika seorang pemimpin seringkali memberikan pidato yang mengagungkan nilai-nilai Pancasila, namun dalam tindakan sehari-hari justru melanggar nilai-nilai tersebut, maka masyarakat akan sulit untuk mempercayai nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan generasi muda kehilangan motivasi untuk belajar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, jika seorang

pejabat tinggi seringkali terlihat mewah dan konsumtif, maka hal ini akan sulit untuk dipadukan dengan nilai-nilai kesederhanaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Akibatnya, generasi muda akan cenderung lebih mengagumi gaya hidup konsumtif daripada nilai-nilai luhur bangsa.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap cara berpikir manusia. Munculnya berbagai teori dan paradigma baru dapat menantang nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila. Munculnya berbagai platform media sosial dan internet telah memberikan kemudahan akses terhadap informasi yang sangat luas. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, seperti maraknya hoaks dan disinformasi. Hal ini dapat mengaburkan batas antara informasi yang benar dan salah, sehingga menghambat kemampuan individu untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, kemajuan teknologi juga memunculkan dilema etika baru yang perlu dipertimbangkan, seperti penggunaan kecerdasan buatan, bioteknologi, dan pemantauan digital. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Di sisi lain, perkembangan IPTEK juga membuka peluang baru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Misalnya, penggunaan simulasi, video, dan game edukasi dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak dalam Pancasila. Namun, pemanfaatan teknologi juga harus diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat, agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang tinggi.

5. Kondisi Ekonomi dan Politik; Kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu nilai dan moral. Ketika masyarakat dihadapkan pada masalah ekonomi yang mendesak, nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial mungkin menjadi kurang relevan.

Kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil dapat secara signifikan mempengaruhi relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengasah kritisisme. Ketika suatu negara mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, masyarakat cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada pada pengembangan nilai-nilai moral. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial mungkin menjadi kurang relevan karena individu lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Selain itu, ketidakpastian politik juga dapat

mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu yang lebih fundamental, seperti penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan menganalisis masalah secara mendalam menjadi terhambat.

Di sisi lain, kondisi ekonomi dan politik yang stabil dan demokratis dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan partisipatif. Ketika masyarakat merasa aman dan sejahtera, mereka cenderung lebih berani untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, jika terjadi polarisasi politik yang tajam, maka dialog dan musyawarah yang merupakan nilai-nilai penting dalam Pancasila menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah belah dan sulit untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kerakyatan menjadi kurang relevan.

### **Strategi Meningkatkan Literasi Digital dan Berpikir Kritis**

Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter bangsa dan mendorong berpikir kritis. Namun, dalam era digital yang penuh tantangan, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk menjaga relevansi nilai-nilai tersebut dan mengoptimalkan potensinya dalam mengasah kritisisme masyarakat.

#### **(1) Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila: Integrasi Kurikulum**

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh mata pelajaran, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran Aktif: Mengadopsi metode pembelajaran yang aktif, seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan simulasi, untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Pengembangan Media Pembelajaran: Memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti video edukasi, game edukasi, dan platform pembelajaran online. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang Pancasila sebagai konsep, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan teknologi secara bijak. Melalui pendekatan ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi individu yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan di era Society 5.0 dengan integritas dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila

#### **(2) Penguatan Literasi Digital; Program Literasi Digital Nasional**

Meluncurkan program nasional yang komprehensif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks, mengevaluasi informasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kemitraan dengan Platform Digital: Membangun kemitraan dengan platform media sosial dan search engine untuk mempromosikan konten yang positif dan edukatif, serta mengurangi penyebaran hoaks.

#### **(3) Penguatan Literasi Media ; Pendidikan Media**

Melaksanakan pendidikan media di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisis pesan media, membedakan fakta dan opini, serta memahami agenda di balik pesan media. Promosi Jurnalisme Berkualitas: Mendukung media massa yang memproduksi berita yang akurat, berimbang, dan konstruktif.

**(4) Pengembangan Platform Diskusi Publik; Forum Online**

Memfasilitasi diskusi publik yang sehat dan konstruktif melalui forum online, media sosial, dan platform diskusi lainnya. Ruang Publik: Menyediakan ruang publik yang aman dan inklusif untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial dan politik. Pengembangan literasi digital, berpikir kritis, dan persatuan bangsa merupakan tantangan yang kompleks, namun dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai aspek kehidupan, kita dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

**KESIMPULAN**

Analisis di atas telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi dinamika zaman modern. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sebuah paradigma yang dapat membimbing pengembangan berbagai disiplin ilmu. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial memiliki potensi besar untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan kritis. Berpikir kritis merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam era informasi saat ini. Nilai-nilai Pancasila, dengan penekanan pada rasionalitas, empati, dan musyawarah, menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, individu dapat mengevaluasi informasi secara objektif, memecahkan masalah kompleks, dan mengambil keputusan yang bijak.

**REFERENSI**

- Annisa, H., & Ulfatun Najicha, F. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40–48. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>
- Alhudawi, U. (2023). Filsafat Pancasila Dalam Perkembangan Teknologi. *Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 26-32.
- Adhari, F. N., & Dewi, D. A. (2022). Menurunnya Nilai Pancasila Sila Ke 5 Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Pada Kaum Generasi Milenial. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 114-119.
- Arum, W. S. A., Fahri, M., Amelia, N., & Watini, S. (2023). Implementasi Perkembangan Ilmu dan Teknologi Dalam Pendidikan Karakter Pancasila. *Technomedia Journal*, 8(1 Special Issues), 18-29.
- Fadilah, N., & Najicha, F. U. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sila Pertama Dalam Era Pembelajaran Daring Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 72-78.

- Facione, P. A. (2015). *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. Measured Reasons LLC: Insight Assessment. [Online]. Diakses dari: [www.insightassessment.com](http://www.insightassessment.com).
- Kuhn, D. (2007). *How to produce a high-achieving child*. Phi Delta Kappan, 88(10), 757-763.
- Putri, S. S., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 509-518.
- Prihandini, N. K. (2020). Literasi Media dan Kritisisme dalam Era Digital: Sebuah Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 14(2), 123-135
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan Sikap Nasionalisme Warga Negara : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 59–64. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5755>
- Sanusi, U. (2019). Peran Pancasila Dalam Perkembangan Dan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Jurnal TEDC*, 13(3), 311-318.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Schafersman, S. D. (1991). *An Introduction To Critical Thinking*. [Online]. Diakses dari: <http://www.freeinquiry.com/critical-thinking.html>.
- Sudjito, (2007), *Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu*, Pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_190\\_\(449847647\)%20Prof%20Dr.%20Sudjito%20\(Makalah%20Outk%20Dosen\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_190_(449847647)%20Prof%20Dr.%20Sudjito%20(Makalah%20Outk%20Dosen).pdf) diakses 2 september 2024
- Nurhadi Sucahyo. (2019). Hoaks Makin Merajalela Jelang Pemilu, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/hoaks-makin-merajalela-jelang-pemilu/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/hoaks-makin-merajalela-jelang-pemilu/0/sorotan_media) diakses, 2 september 2024.
- Najicha. (2022). Pentingnya Pancasila Menjadi Mata Pelajaran Wajib dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Guna Menjaga Keutuhan Bangsa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 1–5.
- Nur Fadhila, H. I., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204–212. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303>
- Mahfud MD. (2021). *Negara Hukum Indonesia: Sejarah, Isu Aktual, dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wibowo, K. A., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 4(1), 22-3
- www.indikator.co.id, (2024). Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Temuan Survei Nasional: 30 Desember 2023 – 6 Januari 2024, <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>, diakses pada 2 September 2024